

# KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Sabtu-Senin, 30-2 Nov-Des 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

## **KATA PENGANTAR**

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Koran Tempo Ekonomi Bisnis Halaman 1	Sabtu, 30 November 2019	Pembangunan Jalan Menuju Patimban Terancam Molor	Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan pelabuhan Patimban di kabupaten subang, Jawa Barat, kemarin. Pelabuhan yang ditargetkan rampung pada 2027 ini digadang-gadang menjadi pelabuhan terbesar Total investasinya Rp 50 triliun.
2	Kompas Halaman 2	Sabtu, 30 November 2019	“Omnibus Law” Opsi Regulasi Ibu Kota Baru	Pemerintah mempertimbangkan skema omnibus law undang-undangan ibu kota negara untuk memangkas 43 regulasi yang saling terkait dan berpotensi tumpang tindih saat penyusunan payung hukum persiapan dan pembangunan pusat pemerintahan baru di wilayah Kalimantan Timur.
3	Media Indonesia Halaman 5	Sabtu, 30 November 2019	Waduk Jatiluhur Riwayatmu Kini	Pembangunan waduk jatiluhur dilakukan dengan membendung sungai citarum. Luas daerah aliran sungai tersebut mencapai 4.500 kilometer persegi. bendungan ini mulai didirikan pada 1957 dengan peletakan batu permata oleh presiden pertama republic Indonesia sekarno dan diresmikan presiden Soeharno pada 26 agustus 1967.
4	Kompas Halaman 13	Sabtu, 30 November 2019	Berita Foto	Presiden Joko Widodo Bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pembangunan pelabuhan patimban di kabupaten Sumbang, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019). Pelabuhan Patimban yang keseluruhannya seluas 654 hektar ini akan difungsikan sebagai terminal peti kemas serat Kawasan pengudangan, perkantoran, pengelolaan, dan bisnis.
5	Bisnis Indonesia Halaman 4	Senin, 2 Desember 2019	Berita foto	Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wempi Wetipo (kiri) berbincang dengan kepala Balai Sarana Permukiman Wiyayah Papua, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Corneles Sagrim (kanan) meninjau pembangunan venue di kampung Harapan Kabupaten Sentani, Jayapura, Papua Minggu(1/12). Venue tersebut akan digunakan untuk PON 2020 di Papua.
6	Bisnis Indonesia Halaman 8	Senin, 2 Desember 2019	Jabar Desak Pusat Realisasikan Janji	Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak bersikap labil dengan rencana pembangunan tol Bandung-Tasikmalaya-Banjar-Cilacap.
7	Bisnis Indonesia	Senin, 9 Desember	9 Jalan Baru Dibangun	Sebanyak Sembilan jalan baru yang akan dibangun di Sumatra Utara dalam rangka penguatan

	Halaman 9	2019		Infrastruktur jalan di wilayah tersebut.	
<b>8</b>	Kompas Halaman 16	Senin, Desember 2019	2	Proyek Rumah Bersubsidi Tersandera	Pembangunan sekitar 12.000 rumah yang disebut bersubsidi di kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terancam tak terealisasi meski telah mengantongi izin, penyebabnya, ada kettidaksesuaian data rencana tata ruang antar pemerintah kabupaten Cirebon dan badan pertahanan nasional kabupaten Cirebon.
<b>9</b>	Media Indonesia Halaman 17	Senin, Desember 2019	2	Riau Menanti Tuah Tol	Tidak ada yang salah dengan pembangunan tol. Keyakinan itu di lontarkan Gubernur Riau Syamsuar, kemarin
<b>10</b>	Kompas Halaman 17	Senin, Desember 2019	2	Membanguna kota Pintar di Expo 2020 Dubai	Expo 2020 Dubai akan digelar 20 Oktober 2020 10 April 2021. Acara itu akan digelar di area seluas 4,38 kilometer persegi atau 438 hektar di Distrik Dubai Selatan, Uni Emirat Arab (UEA). Arena Expo 2020 Dubai dibagi dalam tiga zona khusus atau distrik tematik, yaitu Opportunity (peluang), Mobility (mobilitas), dan Sustainability
<b>11</b>	Bisnis Indonesia Halaman 23	Senin, Desember 2019	2	Ipal Skala Kota Terus Digenjot	Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hari suprayogi mengatakan, semua proyek pembangunan IPAL terpusat skala perkotaan di sejumlah kota terus berprogres.

Judul	<b>Pembangunan Jalan Menuju Patimban Terancam Molor</b>	Tanggal	Sabtu, 30 November 2019
Media	Koran Tempo Ekonomi Bisnis Halaman 1		
Resume	Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan pelabuhan Patimban di kabupaten subang, Jawa Barat, kemarin. Pelabuhan yang ditargetkan rampung pada 2027 ini digadang-gadang menjadi pelabuhan terbesar Total investasinya Rp 50 triliun.		

EKONOMI DAN BISNIS

## Pembangunan Jalan Menuju Patimban Terancam Molor

Pemerintah menargetkan proyek jalan akses Pelabuhan Patimban rampung pada April 2020.

ESKSI, 30 NOVEMBER 2019



JAKARTA – Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, kemarin. Pelabuhan yang ditargetkan rampung pada 2027 ini digadang-gadang menjadi pelabuhan terbesar. Total investasinya Rp 50 triliun.

"Arah ke depan ini menjadi pelabuhan khusus untuk mobil," ujar Jokowi, kemarin. Ia ingin pelabuhan itu menjadi hub bagi produksi otomotif yang diekspor ke Australia, Selandia Baru, atau negara-negara ASEAN.

Untuk menuju pelabuhan, pemerintah tengah membangun jalan akses sepanjang 8,3 kilometer yang ditargetkan rampung pada April 2020. Namun pembangunan jalan menuju Pelabuhan Patimban terancam molor. Hal itu terungkap saat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono meninjau lokasi, Kamis lalu. Saat itu, Basoeki sempat menyambangi beberapa titik di sepanjang proyek, lalu menemukan beberapa ruas jalan yang terbengkalai.

"Ini masih pukul 4 sore, tapi tidak ada yang kerja. Dua pekan lagi, saya cek ke sini harus ada perubahan. Ini masih bisa dipercepat," ujar Basoeki kepada pekerja kontraktor di Subang, Jawa Barat.

Kontrak pembangunan jalan akses Pelabuhan Patimban dan konsultan supervisi telah ditandatangani pada 14 Agustus 2018 dengan kontraktor pelaksana PT PP, PT Bangun Cipta Kontraktor, dan Shimizu Corporation dengan alokasi anggaran Rp 1,12 triliun. Perkembangan proyek itu baru mencapai 55,8 persen.

Basoeki mendesak kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target. Sebab, ketersediaan infrastruktur jalan itu sangat krusial untuk menunjang Pelabuhan Patimban yang akan menjadi pelabuhan internasional terbesar di Indonesia selain Pelabuhan Tanjung Priok.

General Superintendent Shimizu Corporation Shahizan pesimistis pembangunan jalan akses menuju Patimban selesai pada April tahun depan. Ia menyampaikan masih ada kendala dalam pengerjaan, seperti kekurangan tenaga kerja hingga peralatan kerja.

"Kalau untuk selesai April agak berat. Mungkin mundur sekitar empat bulan jadi sekitar Agustus," ujar Shahizan.

Basoeki menolak mengulur target penyelesaian. Sebab, kata dia, jalan akses Pelabuhan Patimban merupakan salah satu tindak lanjut hasil pertemuan Jokowi dengan Perdana Menteri Jepang periode 2007-2008, Yasuo Fukuda, yang juga Ketua Asosiasi Jepang-Indonesia.

"Karena jalan akses ini bagian dari kerja sama Indonesia-Jepang dengan skema pinjaman yang melibatkan kontraktor dari negara pemberi pinjaman," kata Basoeki. Itu sebabnya, kata dia, proyek ini harus selesai tepat waktu.

Jalan akses Pelabuhan Patimban dibangun dengan menggunakan tiga metode konstruksi yang sebagian besar elevated atau jalan layang. Hal ini dilakukan lantaran kondisi tanah di sekitar lokasi berupa persawahan dengan kontur tanah yang lunak. Ketiga konstruksi terdiri atas pile slab sepanjang 5,9 kilometer, flyover sepanjang 1,6 kilometer, dan flexible pavement sepanjang 0,7 kilometer.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan konsorsium PT Jasa Marga, PT Surya Semesta Internusa, PT Daya Mulia Turangga, dan PT Jasa Sarana ditetapkan sebagai pemrakarsa perusahaan jalan tol akses Patimban dengan nilai investasi sekitar Rp 6,35 triliun. Jalan tol ini akan menghubungkan Pelabuhan Patimban dengan jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) sepanjang 29,8 kilometer.

Adapun progres pembangunan akses tol ini telah memasuki finalisasi dokumen studi kelayakan, desain dasar, row plan, analisis mengenai dampak lingkungan, serta dokumen perencanaan pengadaan tanah dari pemrakarsa ke BPJT untuk persiapan proses lelang. "Kami harap ini bisa segera selesai," ujar

Danang. **LARISSA HUDA**

---

## AGAR SAMPAI KE PELABUHAN

Jalan non-tol sepanjang 8,2 kilometer meter ini merupakan akses menuju Pelabuhan Patimban dari jalan tol Patimban yang berpotongan dengan jalan tol Cipali. Jalan ini diharapkan turut menopang aktivitas industri di Karawang dan Bekasi.

- **Sumber Dana:** Pinjaman JICA
- **Tanggal Kontrak:** 14 Agustus 2018
- **Nilai Kontrak (termasuk PPN):**  
Rp 1.112.637.988.554 + ¥ 127.050.812
- **Total Kontrak Ekuivalen:** Rp 1.127.987.537.144
- **Ekuivalen tanpa Pajak:** Rp 1.025.445.034.676  
(Nilai tukar: ¥ 1 = Rp 120,83 per 16 Januari 2018)
- **Masa Pelaksanaan:** 18 bulan (540 hari kalender) hingga 14 April 2020
- **Masa Pemeliharaan:** 24 bulan (730 hari kalender) hingga 14 April 2022
- **Kontraktor:** PT PP, PT Bangun Cipta Kontraktor, dan Shimizu Corporation
- **Konsultan pengawas:** Katahira & Engineer International bekerja sama dengan Nippon Engineering Consultant serta PT Perentjana Djaja, PT Sarana Multi Daya, PT Parama Karya Mandiri, PT Mekaro Daya Mandiri, dan PT Maratama Cipta Mandiri senilai Rp 63,51 miliar.
- **Lebar Lajur:** 2 x 2 x 3,5 meter

Judul	“Omnibus Law” Opsi Regulasi Ibu Kota Baru	Tanggal	Sabtu, 30 November 2019
Media	Kompas Halaman 2		
Resume	Pemerintah mempertimbangkan skema omnibus law undangan-undangan ibu kota negara untuk memangkas 43 regulasi yang saling terkait dan berpotensi tumpang tindih saat penyusunan payung hukum persiapan dan pembangunan pusat pemerintahan baru di wilayah Kalimantan Timur.		

# “Omnibus Law” Opsi Regulasi Ibu Kota Baru

Sebanyak 43 regulasi yang saling terkait dan berpotensi tumpang tindih dalam payung hukum ibu kota negara akan dijadikan satu menjadi RUU IKN.

**JAKARTA, KOMPAS** — Pemerintah mempertimbangkan skema *omnibus law* Undang-Undang Ibu Kota Negara untuk memangkas 43 regulasi yang saling terkait dan berpotensi tumpang tindih saat penyusunan payung hukum persiapan dan pembangunan pusat pemerintahan baru di wilayah Kalimantan Timur.

Sementara itu, terkait rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke wilayah Kaltim, sejumlah investor asing menyatakan minatnya, yaitu Jepang dan Korea Selatan (Korsel).

Saat lokakarya “Penerapan ‘Omnibus Law’ dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara” di Jakarta, Jumat (29/11/2019), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoaifa menyatakan, dari 43 regulasi yang menjadi landasan awal pembentukan ibu kota baru dan bersinggungan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN, pemerintah mempertimbangkan menatanya pada satu regulasi *omnibus law*.

Penataan untuk menghindari konflik dan tumpang tindih sejumlah ketentuan dalam dasar hukum pembentukan ibu kota negara baru tersebut. Sebanyak 43 regulasi yang bersinggungan itu termasuk 14 UU yang terdiri dari empat UU terkait kedudukan IKN, empat UU terkait batas dan wilayah, tiga UU terkait bentuk dan susunan

pemerintah, dua UU tentang kawasan khusus pusat pemerintahan, satu UU tentang penataan ruang, satu UU tentang lingkungan hidup, serta satu UU terkait penanggulangan bencana. Ada pula peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang perlu disinkronisasi.

“Diperlukan pendalaman regulasi mana yang kita jadikan *omnibus law*. Yang penting landasan hukum perundang-undangan itu bisa digunakan secepat mungkin karena kalau tidak, kita tak bisa mulai membangun ibu kota baru. Oleh karena itu, kami menargetkan sebelum 15 Desember RUU IKN dibahas untuk menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” ujar Suharso.

## Tawaran banyak negara

Menanggapi minat Jepang dan Korsel ikut serta dalam pemindahan ibu kota negara, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyambut baik kerja sama tersebut. “Memang banyak negara yang menawarkan diri, artinya laku itu (rencana ibu kota negara), berarti suatu hal yang menarik. Bagi kita, tentu kita terbuka dengan negara mana pun yang akan berpartisipasi,” tutur Wapres Amin menjawab pers di Kantor Wapres.

Kendati demikian, Wapres menegaskan, pemilihan kerja sama untuk pembangunan ibu kota baru sangat tergantung pada teknologi yang memadai dan

sesuai rencana. Selain itu, semua akan tergantung pada kondisi-kondisi yang disepakati. Di sisi lain, pemindahan ibu kota saat ini masih pada tahap penyempurnaan perencanaan dan terus dibahas. “Sedang disempurnakan dan kemudian akan dibuat UU-nya,” kata Wapres Amin, menambahkan.

Selama ini, tambah Wapres Amin, Bappenas ditunjuk mengoordinasikan pemindahan ibu kota negara. Untuk itu, disiapkan badan otoritas mengelola pemindahan ibu kota.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Leonard Tampubolon saat dihubungi menyatakan, kerja sama dengan negara mana pun dalam pemindahan ibu kota negara bisa dilakukan. Namun, masih harus dilihat lebih rinci kerja samanya. Bentuk kerja samanya bisa bermacam-macam, dari investasi hingga hibah. Namun, spesifikasinya masih disusun Bappenas.

## Penataan hukum

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, yang hadir saat lokakarya tersebut, mendukung apa yang disampaikan Suharso. Menurut dia, untuk menghindari regulasi yang saling bertabrakan saat landasan hukum membangun ibu kota, RUU IKN bisa menjadi contoh penataan politik hukum. Namun, perlu diperhatikan sejumlah UU yang perlu dibenahi lewat *omnibus law*.

Anggota Badan Legislasi DPR, Firman Soebagyo, menambahkan, pembentukan RUU IKN lewat *omnibus law* bisa menjadi model pembenahan regulasi yang tumpang tindih. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Widodo Ekatjahjana menambahkan, pihaknya tengah mengidentifikasi tiga strategi penyederhanaan 43 regulasi di dalam RUU IKN.

(SAN/INA)



Judul	<b>Waduk Jatiluhur Riwayatmu Kini</b>	Tanggal	Sabtu, 30 November 2019
Media	Media Indonesia Halaman 5		
Resume	Pembangunan waduk jatiluhur dilakukan dengan membendung sungai citarum. Luas daerah aliran sungai tersebut mencapai 4.500 kilometer persegi. bendungan ini mulai didirikan pada 1957 dengan peletakan batu permata oleh presiden pertama republic Indonesia sekarno dan diresmikan presiden Soeharo pada 26 agustus 1967.		

## Waduk Jatiluhur Riwayatmu Kini



Menara pengawas limpasan air bernama Morning Glory di Waduk Jatiluhur. Di dunia hanya ada dua negara yang memiliki Morning Glory yaitu Indonesia dan Afrika Selatan.

**PEMBANGUNAN** Waduk Jatiluhur dilakukan dengan membendung Sungai Citarum. Luas daerah aliran sungai tersebut mencapai 4.500 kilometer persegi. Bendungan ini mulai didirikan pada 1957 dengan peletakan batu pertama oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan diresmikan Presiden Soeharto pada 26 Agustus 1967.

Waduk Jatiluhur terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Jaraknya sekitar 9 kilometer dari pusat Kota Purwakarta. Waduk yang awalnya sempat dinamakan pemerintah RI dengan nama Ir H Djuanda itu, tercatat sebagai waduk terbesar di Indonesia.

Ir H Juanda merupakan Perdana Menteri RI terakhir dan memimpin Kabinet Karya (1957-1959). Bersama dengan Ir Sedijatmo, ia dengan gigih memperjuangkan terwujudnya proyek Jatiluhur di dalam dan luar negeri.

Bendungan Waduk Jatiluhur dibangun kontraktor asal Prancis, Compagnie française d'entreprise. Bangunan tersebut menjadi waduk multifungsi pertama di Tanah Air.

Namun, akibat pembangunan itu 14 desa tenggelam sehingga 5.002 orang diungsikan. Sebagian penduduk dipin-

dahkan ke daerah sekitar bendungan dan lainnya pindah ke Kabupaten Karawang. Saat itu sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani.

Dalam Waduk Jatiluhur, terpasang enam turbin dengan daya 187 megawatt yang sanggup menyalurkan produksi tenaga listrik rata-rata 1.000 juta Kwh setiap tahun dan dikelola Perum Jasa Tirta II. Selain itu, Waduk Jatiluhur memiliki fungsi penyediaan air irigasi untuk 242 ribu hektare sawah.

Selain berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan sistem limpasan terbesar di dunia, kawasan Jatiluhur memiliki banyak fasilitas rekreasi yang tergolong mumpuni. Lihat saja di kawasan itu terdapat hotel dan bungalow, bar dan restoran, lapangan tenis, biliard, perkemahan, kolam renang dengan *water slide*, ruang pertemuan, sarana rekreasi dan olahraga air, serta *playground*.

Di perairan Waduk Jatiluhur juga terdapat budi daya ikan keramba jaring apung yang menjadi daya tarik tersendiri. Di waktu siang atau dalam keheñingan malam, kita dapat memancing penuh ketenangan sambil menikmati sajian ikan bakar nan khas menggugah selera. (RZ/\*/S3-25)

Judul	<b>Berita Foto</b>	Tanggal	Sabtu, 30 November 2019
Media	Kompas Halaman 13		
Resume	Presiden Joko Widodo Bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pembangunan pelabuhan patimban di kabupaten Sumbang, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019). Pelabuhan Patimban yang keseluruhannya seluas 654 hektar ini akan difungsikan sebagai terminal peti kemas serat Kawasan pengudangan, perkantoran, pengelolaan, dan bisnis.		

## Pelabuhan Patimban



KOMPAS/WAWAN H PRADOWO

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019). Pelabuhan Patimban yang keseluruhannya seluas 654 hektar ini akan difungsikan sebagai terminal peti kemas serta kawasan pergudangan, perkantoran, pengelolaan, dan bisnis.

Judul	<b>Berita foto</b>	Tanggal	Senin, 2 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 4		
Resume	Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wempi Wetipo (kiri) berbincang dengan kepala Balai Sarana Permukiman Wilayah Papua, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Corneles Sagrim (kanan) meninjau pembangunan venue di kampung Harapan Kabupaten Sentani, Jayapura, Papua Minggu(1/12). Venue tersebut akan digunakan untuk PON 2020 di Papua.		

► PEMBANGUNAN SARANA PON 2020



Antara/Dusti Tanati

**Wakil Menteri** Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wempi Wetipo (*kiri*) berbincang dengan Kepala Balai Sarana Permukiman Wilayah Papua, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian (PUPR) Corneles Sagrim (*kanan*) saat meninjau

pembangunan venue di Kampung Harapan Kabupaten Sentani, Jayapura, Papua, Minggu (1/12). Venue tersebut akan digunakan untuk PON 2020 di Papua.

Judul	Jabar Desak Pusat Realisasikan Janji	Tanggal	Senin, 2 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 8		
Resume	Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak bersikap labil dengan rencana pembangunan tol Bandung-Tasikmalaya-Banjar-Cilacap.		

► **TOL CIGATAS**

## Jabar Desak Pusat Realisasikan Janji

Bisnis, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR] tidak bersikap labil dengan rencana pembangunan Tol Cigatas atau Tol Bandung-Tasikmalaya-Banjar-Cilacap.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan *statement* terakhir Dirjen Bina Marga PUPR yang belum memastikan apakah jalan tol tersebut akan mulai dibangun pada 2020 mendatang mengingatkan pemerintah ingin lebih mengoptimalkan ruas Pantai Selatan. "Yang saya tahu di PUPR itu kan sudah dirilis lelang investasinya," katanya di Bandung, Minggu (12/1).

Bahkan dari lelang investasi tersebut nilainya pun sudah dipublikasikan, begitupun dengan proses lelang yang dijanjikan langsung Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Pihaknya mengaku sebagai pemimpin wilayah, meminta proses pembangunan tol ini berlanjut dengan mengakomodir keinginan daerah. "Tidak bisa hanya dengan teori dari pemerintah pusat," ujarnya.

Ridwan Kamil bahkan mengingatkan PUPR bahwa proyek tersebut sendiri sudah merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo saat Pilpres 2019. Menurutnya, dalam satu kesempatan kampanye di wilayah Garut, Jokowi memastikan pembangunan tol tersebut akan menjadi prioritas. "Saya kira komitmen Pak Presiden pada rakyat Jawa Barat di Garut itu jadi pegangan," katanya.

Dia berencana karena proyek ini sudah mulai konkret akan ditawarkan pula pada investor di Abu Dhabi dalam rencana kunjungannya mendampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan dalam waktu dekat. "Selain kawasan Rebana saya juga akan membawa tol ini ke Abu Dhabi," papar Ridwan Kamil.

### KABAR TERAKHIR

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar Koswara mengatakan kabar terbaru dari Dirjen Bina Marga PUPR cukup mengejutkan karena perkembangan terakhir Tol Cigatas yang dipegang pi-

haknya adalah rapat Gubernur Jabar bersama kepala daerah yang dilewati trase Cigatas bersama PUPR sekitar 2 bulan lalu. "Itu informasi terakhir saat rapat rame-rame," ujarnya.

Menurutnya, dari rapat terakhir terkait trase tersebut pihak PUPR masih memproses semua usulan para kepala daerah. Koswara menilai dari rapat itu menunjukkan proyek tersebut masih menjadi prioritas khususnya untuk tol jalur selatan. "Belum ada pemberitahuan lagi dari situ [oleh PUPR], kami belum konfirmasi informasi terakhir dari Dirjen Bina Marga," katanya.

Koswara juga heran jika proyek tol tersebut dievaluasi oleh pihak PUPR mengingat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) masih melanjutkan proses lelang investasi. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti informasi terbaru dari pemerintah pusat, meskipun masih optimistis proyek ini mulai 2020 tetap berlanjut.

Sebelumnya di Bandung, Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan bahwa pihaknya memiliki target pembangunan jalan tol tersebut untuk tahap I Gedebage-Tasikmalaya bisa beroperasi pada 2024.

Karena itu pihaknya bersama Pemprov Jawa Barat mengumpulkan kepala daerah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya hingga Ciamis untuk membahas trase.

"Berdasarkan target itulah persiapan dokumen [trase] ini harus selesai. Terutama trase, jadi hari ini khusus kami bicara dua hal trase dan akses dengan para pemangku kepentingan karena itu penting," katanya usai rapat Tol Cigatas di Gedung Sate, Bandung, Rabu (25/9).

Menurutnya, setelah mengunci trase, urusan selanjutnya adalah mendetilkkan kebutuhan lahan yang dipastikan memakan waktu dan energi cukup lama.

Jika trase terus berubah-ubah, proyek ini dinilai akan jalan di tempat dan tidak menunjukkan kemajuan. "Kami bertemu dengan fasilitasi Gubernur [Ridwan Kamil] untuk memastikan *fix trase* dan aksesnya," ujarnya. 0657

Judul	<b>9 Jalan Baru Dibangun</b>	Tanggal	Senin, 9 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 9		
Resume	Sebanyak Sembilan jalan baru yang akan dibangun di Sumatra Utara dalam rangka penguatan Infrastruktur jalan di wilayah tersebut.		

► INFRASTRUKTUR SUMUT

## 9 Jalan Baru Dibangun

Bisnis, MEDAN — Sebanyak sembilan jalan baru yang akan dibangun di Sumatra Utara dalam rangka penguatan infrastruktur jalan di wilayah tersebut.

Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Riel Jemmy Mantik menyebut bahwa sembilan jalan baru yang akan dibangun di Sumut tersebut seperti yang tertuang dalam program RPJMN 2020–2024.

Dia menjelaskan sembilan jalan yang dimaksud yaitu Jalan Lingkar Luar Selatan Medan sepanjang 45,6 km, Relokasi Jalan Aek Latong Tapsel sepanjang 24 km, Jalan Siantar By Pass sepanjang 4 km, Jalan Siborongborong By Pass sepanjang 10 km, Jalan Balige By Pass sepanjang 3,4 km.

Selain itu, akses jalan ke Pelabuhan Parlimbungan Ketek Batahan Madina sepanjang 26,5 km, jalan lingkar Danau Toba sepanjang 50 km. Adapula Jalan Lingkar Luar Barat Medan sepanjang 10 km, dan Jalan Lingkar Luar Utara Medan sepanjang 10 km.

Adapun untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara memperkuat sinergi koordinasi terkait dengan percepatan pembinaan pembangunan jalan. Pasalnya, keberadaan infrastruktur jalan dan jembatan sangat vital menjadi penggerak utama roda perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan tidak akan tercapai tanpa ketersediaan jalan dan jembatan yang layak, baik di jalan-jalan kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Untuk itu, sinergi dan koordinasi terkait percepatan pembinaan jalan diharapkan segera terwujud.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatra Utara Sabrina mengatakan baik jalan kewenangan kabupaten/kota, provinsi, maupun kewenangan nasional akan terus disinergikan.

“Jangan nanti bekerja masing-masing tanpa koordinasi, sehingga mana daerah sentra ekonomi yang harusnya jadi prioritas terlambat pembenahan infrastrukturnya. Ini salah satu yang nanti yang meng-

hambat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya, Minggu (1/12).

Sebelumnya, Sabrina mengatakan bahwa Pemprov Sumut telah memperbaharui fungsi dan status jalan provinsi sesuai dengan keputusan gubernur menurut fungsinya dan menurut status pada 8 Juni 2018.

Semula jalan provinsi sepanjang 3.048,50 kilometer atau 144 ruas menjadi 3.005,63 km atau 171 ruas. Sedangkan jalan nasional di Provinsi Sumut sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepanjang 2.632,22 km dan panjang jalan kabupaten/kota di Sumut adalah sepanjang 33.383,66 km.

Dia mengatakan Pemprov Sumut mendukung terbentuknya forum pembinaan jalan daerah. Adapun anggota forum terdiri atas para OPD di Sumut. “Dengan adanya forum ini diharapkan tercipta pembinaan jalan sesuai undang-undang serta koordinasi dan sinergitas yang kemudian membawa banyak manfaat bagi masyarakat Sumut,” tutur Sabrina.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumut Effendy Pohan menyampaikan bahwa penguatan sinergitas tersebut sebagai salah satu perwujudan prioritas pembangunan Provinsi Sumut 2019-2023 yakni pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

Sebelumnya juga telah dilakukan pengukuhan Kepengurusan Forum Komunikasi Pembinaan Jalan Daerah Provinsi Sumut 2019-2020 terdiri dari Balai Besar Jalan Nasional Wilayah II Medan. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumut Effendy Pohan selaku Koordinator Forum, Kepala BPJN II Medan Selamat Rasidi sebagai Wakil Koordinator, dan 33 Kadis PU kabupaten/kota se Sumut sebagai anggota.

“Ini untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang intens di antara pembina jalan daerah baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Mudah-mudahan dengan adanya forum ini nanti ada terobosan baru yang terwujud dalam pembinaan jalan,” ungkap Effendy. *(Asteria Desi Kartika Sari)*

Judul	<b>Proyek Rumah Bersubsidi Tersandera</b>	Tanggal	Senin, 2 Desember 2019
Media	Kompas Halaman 16		
Resume	Pembangunan sekitar 12.000 rumah yang disebut bersubsidi di kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terancam tak terealisasi meski telah mengantongi izin, penyebabnya, ada ketidaksesuaian data rencana tata ruang antar pemerintah kabupaten Cirebon dan badan pertahanan nasional kabupaten Cirebon.		

# Proyek Rumah Bersubsidi Tersandera

BPN Kabupaten Cirebon dan Pemkab Cirebon berbeda pandangan soal tata ruang. Sekitar 12.000 rumah bersubsidi terancam tidak terbangun.

**CIREBON, KOMPAS** — Pembangunan sekitar 12.000 rumah yang disebut bersubsidi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terancam tak terealisasi meski telah mengantongi izin. Penyebabnya, ada ketidaksesuaian data rencana tata ruang antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon.

Para pengembang perumahan belum berani memulai pembangunan karena pihak BPN belum menerbitkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) induk. Di sisi lain, pengembang sudah memenuhi sejumlah persyaratan, seperti fatwa dan izin lokasi dari Pemkab.

"Semua sudah selesai. Kurang kami apa?" kata Ketua Real Estat Indonesia Wilayah III Cirebon Gunadi, Minggu (1/12/2019), di Cirebon.

Ia heran karena pertimbangan teknis pertanahan dari BPN Kabupaten Cirebon yang jadi syarat memperoleh SHGB induk sudah didapat. Pertimbangan itu memuat ketentuan dan syarat penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang.

Kepala BPN Kabupaten Cirebon Lutfi Zakaria mengatakan, karena pertimbangan teknis pertanahan lokasi yang diajukan pengembang masih dikaji. "Setelah dilihat hasilnya (pertimbangan teknis pertanahan) tidak sesuai tata ruang," kata Lutfi, yang sebulan terakhir memimpin BPN Cirebon.

Sejumlah lokasi pembangunan perumahan tidak sesuai peta



KOMPAS/ABDULLAH FIRRI ASHRI

Deretan rumah baru dibangun di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (28/11/2019). Para pengembang perumahan bersubsidi di Kabupaten Cirebon mengeluhkan belum terbitnya sertifikat hak guna bangunan induk yang mengancam keberlanjutan pembangunan meski sejumlah persyaratan telah dipenuhi.

pola ruang wilayah dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2018-2038. Padahal, dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional disebutkan, tanah harus sesuai tata ruang.

"Aturan mainnya di pusat. Saya sudah tiga kali ke sana. Kami juga berkoordinasi dengan Pemkab Cirebon menyelesaikan ini," kata Lutfi.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Uus Sudrajat mengatakan,

fatwa atau izin pemanfaatan ruang untuk perumahan sudah sesuai RTRW. "Sekarang terserah BPN (Kabupaten Cirebon) mau mengeluarkan sertifikat atau tidak," katanya.

## Merugi

kinan terburuk jika SHGB induk tak diterbitkan, perumahan tak akan dibangun. "Setiap pengembang merugi Rp 3 miliar sampai Rp 5 miliar. Itu biaya beli tanah dan lain-lain. Sementara pembeli tak bisa beli rumah bersubsidi," katanya.

Akibat ketidakjelasan itu, sekitar 40 pengembang memper-

tanyakan kepastian investasi properti di Cirebon. Rata-rata membangun 350 rumah.

Menurut anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan, masalah yang dihadapi pengembang tidak bisa dipisahkan dari semrawutnya masalah tata kasus (korupsi) Sunjaya (mantan Bupati Cirebon) juga terkait dengan tata ruang. Dari dulu peta tata ruang 2018 tak diperhatikan sehingga ada beda pandangan peta," katanya.

Dugaan korupsi Sunjaya terkait perizinan PLTU 2 senilai Rp 6,04 miliar dan perizinan properti Rp 4 miliar. (IK)

Judul	Riau Menanti Tuah Tol	Tanggal	Senin, 2 Desember 2019
Media	Media Indonesia Halaman 17		
Resume	Tidak ada yang salah dengan pembangunan tol. Keyakinan itu di lontarkan Gubernur Riau Syamsuar, kemarin		

# Riau Menanti Tuah Tol

TIDAK ada yang salah dengan pembangunan tol. Keyakinan itu dilontarkan Gubernur Riau Syamsuar, kemarin.

"Tol Pekanbaru-Dumai disambut baik oleh asosiasi pengusaha dan seluruh pemangku kepentingan karena akan berdampak pada pergerakan ekonomi dan mempermudah arus perdagangan," tambahnya.

Pemerintah Provinsi Riau sangat mendukung proses pembangunan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 kilometer. Saat ini, ruas terbangun mencapai 87,5 km.

Syamsuar menambahkan, keberadaan ruas yang masuk jaringan Tol Sumatra itu akan menjadikan Kota Dumai sebagai pintu masuk bagi 48% pedagang dunia melalui Selat Malaka. "Tol ini akan berperan penting pada pertumbuhan ekonomi di Riau, membuat hubungan ekonomi Sumatra-ASEAN semakin mudah."

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Perusahaan PT Utama Karya Muhammad Fauzan mengaku setelah tol Pekanbaru-Dumai beroperasi, Utama Karya akan mengembangkan kawasan industri, residensial, pariwisata, dan

*mix-use area*. "Hadirnya tol Pekanbaru-Dumai juga akan membuka lapangan kerja dan konektivitas baru."

Di Sulawesi Selatan, pembangunan tol layang Andi Pangerang Pettarani ditargetkan rampung Juni 2020. Proyek sepanjang 4,3 kilometer ini akan menjadi tol layang pertama di luar Jawa. "Kehadirannya juga akan menambah estetika. Ini bukan sekadar tol biasa," ungkap Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb.

Sebelumnya, Projects Manager PT Wijaya Karya Beton Tbk Didi Rustadi mengatakan tol layang dikerjakan sejak 2 April 2018. "Ada penambahan pekerjaan pemindahan pipa PDAM sehingga pekerjaan mengalami keterlambatan dari target seharusnya tuntas pada Februari 2020."

Di sisi lain, PT Angkasa Pura II menyatakan terminal baru Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, siap dibuka pada Februari 2020. Saat ini progres pekerjaan sudah mencapai sekitar 60%. Terminal baru ini akan mampu menampung 5,7 juta penumpang per tahun. (RK/LN/YH/AT/PO/N-3)

Judul	Membanguna kota Pintar di Expo 2020 Dubai	Tanggal	Senin, 2 Desember 2019
Media	Kompas Halaman 17		
Resume	Expo 2020 Dubai akan digelar 20 Oktober 2020 10 April 2021. Acara itu akan digelar di area seluas 4,38 kilometer persegi atau 438 hektar di Distrik Dubai Selatan, Uni Emirat Arab (UEA). Arena Expo 2020 Dubai dibagi dalam tiga zona khusus atau distrik tematik, yaitu Opportunity (peluang), Mobility (mobilitas), dan Sustainability		

KOMPAS | SENIN, 2 DESEMBER 2019

# Membangun Kota Pintar di Expo 2020 Dubai

Setahun lagi pameran terbesar di dunia, yaitu Expo 2020 Dubai, bakal digelar di Uni Emirat Arab. Guna menyukseskan perhelatan itu, UEA tengah menyiapkan sebuah kota pintar untuk tempat penyelenggaraan ekspo yang akan berlangsung enam bulan dan bakal dikunjungi sekitar 25 juta orang dari banyak negara.

Erwin Edhi Prasetya

Expo 2020 Dubai akan digelar 20 Oktober 2020-10 April 2021. Acara itu akan digelar di area seluas 4,38 kilometer persegi atau 438 hektar di Distrik Dubai Selatan, Uni Emirat Arab (UEA). Arena Expo 2020 Dubai dibagi dalam tiga zona khusus atau distrik tematik, yaitu Opportunity (peluang), Mobility (mobilitas), dan Sustainability (keberlanjutan). Di zona-zona itu, setiap negara peserta menempati paviliun untuk memamerkan dan mempromosikan keunggulan mereka. Paviliun Indonesia di zona Opportunity.

Menyambut acara tersebut, Pemerintah UEA kini tengah menyiapkan berbagai infrastruktur modern dan berarsitektur ikonik. Salah satunya adalah membangun gedung Al Wasl Plaza. Gedung berbentuk kubah raksasa itu bakal menjadi pusat berbagai kegiatan penting Expo 2020 Dubai. Berarsitektur anyaman baja setinggi 67,5 meter, Al Wasl Plaza berada di tengah-tengah ketiga distrik tematik. Kubah raksasa itu juga bisa berfungsi sebagai layar proyeksi 360 derajat yang dapat dilihat dari dalam ataupun dari luar. Bangunan itu akan menjadi landmark baru Dubai.

Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional yang juga Direktur Jenderal Expo 2020 Dubai Reem al Hashimy mengatakan, Expo 2020 Dubai akan diikuti lebih dari 190 negara peserta. Pameran itu ditargetkan dikunjungi 25 juta orang dari banyak negara. "Tiap peserta berkesempatan menampilkan hal terbaik yang bisa mereka tawarkan dan membangun kemitraan di antara mereka," katanya di Dubai, akhir Oktober.

Expo 2020 Dubai mengusung tema utama "Menghubungkan Pikiran, Menciptakan Masa Depan" dengan subtema peluang, mobilitas, dan keberlanjutan. Melalui tema itu, Expo 2020 digelar untuk membangun kemitraan, menginspirasi dengan ide-ide baru, dan melahirkan penemuan yang bisa menjadi solusi dari berbagai tantangan yang ada.

Menurut Reem al Hashimy, bagi negara-negara di kawasan Arab, Expo 2020 Dubai juga menjadi kesempatan untuk mempromosikan nilai, kultur, dan heritage mereka di panggung dunia.

UEA menyiapkan arena Expo 2020 Dubai sebagai sebuah kota pintar dengan meng-



KOMPAS/ERWIN EDHI PRASETYA

gandeng mitra utama Siemens AG, perusahaan multinasional asal Jerman yang bergerak di bidang energi dan industri digital. Siemens sendiri telah berpartisipasi sejak pameran terbesar di dunia ini pertama kali digelar di London tahun 1851. Saat itu pendiri perusahaan, Werner von Siemens, meluncurkan telegraf pointer untuk pertama kalinya.

## Masa depan

Kali ini, Siemens jadi mitra utama Pemerintah UEA dalam merancang dan mewujudkan kota pintar di arena Expo 2020 Dubai. Chief Executive Officer of Siemens Middle East dan CEO of Siemens LLC UEA Dietmar Siersdorfer mengatakan, melalui Expo 2020 Dubai, Siemens telah membuat cetak biru kota pintar masa depan. "Kami memakai teknologi *internet of thing* untuk mewujudkan kota pintar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," ujar Dietmar.

Cedrik Neike, anggota Dewan Direksi Siemens AG dan

CEO Smart Infrastructure Siemens, mengatakan, Siemens merancang teknologi digital untuk diintegrasikan di seluruh arena Expo 2020 Dubai. "Sebanyak 137 bangunan di tiga distrik tematik Expo 2020 akan dihubungkan melalui platform analisis energi perusahaan, Siemens Navigator," ujarnya.

Gedung-gedung di tiga distrik tematik itu akan didigitalkan dengan sistem manajemen bangunan pintar (*smart building*) Desigo CC. Sistem akan menggunakan sensor dan menganalisis data yang dihimpun sensor-sensor itu untuk memantau dan mengontrol fungsi bangunan di ketiga distrik, seperti pendingin udara, penggunaan energi listrik, kontrol pencahayaan, tangga berjalan, kualitas udara, dan sistem alarm kebakaran.

Data-data itu diperoleh dari seluruh bangunan di area Expo yang terhubung dengan Siemens Navigator, 200.000 sensor pengumpulan data yang terhubung sistem Desigo CC,

6.500 kamera yang terhubung dengan manajemen video pemantau Siemens Siveillance VMS, dan 3.500 pintu yang terhubung SIPass Integrated (sistem kontrol akses pintar buatan Siemens).

Data yang terkumpul dikirimkan ke MindSphere, yaitu sebuah platform sistem operasi *internet of things* (benda-benda yang terhubung internet) terbuka berbasis awan (*cloud*) buatan Siemens. MindSphere akan menghubungkan, memantau, dan mengontrol seluruh gedung di Expo 2020 Dubai secara digital. Teknologi MindSphere akan menganalisis data-data tersebut untuk membantu pengambilan keputusan secara cerdas.

Penanggung jawab area dan bangunan Expo 2020 Dubai bisa memperoleh visualisasi lengkap infrastruktur gedung dari aplikasi itu. Teknologi aplikasi ini akan membantu mereka mengoptimalkan pengoperasian hingga mengurangi emisi dan limbah. MindSphere memungkinkan pemantauan

dan kontrol infrastruktur dilakukan secara langsung, dari perangkat statis dan seluler.

Data-data dari sistem ini akan dikelola oleh pusat kontrol di setiap zona distrik tematik, misalnya, untuk pemakaian energi listrik secara hemat, memastikan kenyamanan pengunjung dengan pengaturan suhu ruangan secara tepat, hingga menjaga keselamatan dan keamanan para peserta dan pengunjung.

"Ribuan kamera yang terpasang di arena Expo 2020 bisa memantau setiap pengunjung. Kamera ini, misalnya, dengan cepat dapat membantu menemukan seorang anak yang terpisah dari orangtuanya," tutur Oliver Kraft, Direktur Eksekutif Expo 2020 Dubai Siemens LLC, menambahkan.

Cedrik mengatakan, Siemens membantu menghadirkan cetak biru kota pintar di Expo 2020 Dubai dengan maksud agar teknologi itu dapat diterapkan di kota-kota dunia untuk mengembangkan kota pintar di masa depan. Selama ini, bangunan di perkotaan telah mengonsumsi energi yang sangat besar. Kota-kota besar di dunia bakal semakin menghadapi tekanan di masa depan. Diperkirakan lebih dari dua pertiga populasi dunia akan tinggal di perkotaan pada 2050.

Kondisi itu menciptakan berbagai tantangan, seperti kualitas udara yang buruk, sistem air yang tidak efisien, dan kemacetan lalu lintas. Kota-kota di dunia selama ini telah membuat data, tetapi belum mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi dari data itu secara efektif.

Melalui Expo 2020 Dubai, Siemens akan menunjukkan bagaimana menggunakan teknologi *internet of things* untuk mengubah mahadata (*big data*) menjadi data pintar guna menjadikan sebuah kota yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan. Penasaran? Tunggu setahun lagi di Expo 2020 Dubai.

Kantor pusat Siemens wilayah Timur Tengah di kota Masdar, Uni Emirat Arab, Minggu (20/10/2019). Energi terbarukan yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 10 MW dan sistem atap gedung berpanel surya 1 MW memasok kebutuhan listrik di kota berkelanjutan ini.

Judul	<b>IPAL Skala Kota Terus Digenjot</b>	Tanggal	Senin, 2 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 23		
Resume	Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hari suprayogi mengatakan, semua proyek pembangunan IPAL terpusat skala perkotaan di sejumlah kota terus berproses.		

► **PENGOLAHAN LIMBAH CAIR**

# IPAL Skala Kota Terus Digenjot

Bisnis, JAKARTA — Proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL terpusat skala perkotaan dan jaringan perpipaan air limbah terus digenjot guna merealisasikan target akses sanitasi layak meningkat menjadi 90% pada 2024.

Aprianus Doni T.  
redaksi@bisnis.com

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hari Suprayogi mengatakan, semua proyek pembangunan IPAL terpusat skala perkotaan di sejumlah kota terus berproses.

"Semua berproses, semoga berjalan sesuai rencana," katanya saat ditemui *Bisnis*, di Jakarta, pekan lalu.

Selain IPAL terpusat skala perkotaan di Jakarta, beberapa kota lain yang tengah dikembangkan diantaranya Jambi, Pekanbaru, Makassar, Palembang, dan Medan.

Berbeda dengan IPAL Jakarta, pembangunan IPAL terpusat skala kota di lima kota tersebut masuk dalam program Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) dimana pendanaannya merupakan kombinasi dari pinjaman Asian Development Bank (ADB), Hibah Pemerintah Australia, APBN, dan Dana Pemerintah Kota dan Provinsi (APBD).

Seperti dikutip dari laman resmi Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, dana pinjaman melalui ADB

► Selain IPAL terpusat skala perkotaan di Jakarta, beberapa kota lain yang tengah dikembangkan diantaranya Kota Jambi, Kota Pekanbaru, Kota Makassar, Kota Palembang, dan Kota Medan.

sebesar US\$120 juta yang terdiri atas dana Original Capital Resources (OCR) sebesar US\$80 juta dan dana Asean Infrastructure Fund (AIF) sebesar US\$40 juta serta dana hibah dari Pemerintah Australia, melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), sebesar US\$48,83 juta.

Merujuk data dari Direktorat Sumber Daya Air yang diterima *Bisnis*, ada tiga pekerjaan yang dilakukan di Kota Jambi yakni pembangunan IPAL (Jambi Waste Water Treatment Plant/WWTP B1), pembangunan sistem pengumpulan air limbah dan perpipaan (Jambi Sewer System B2), dan jaringan perpipaan air limbah wilayah barat Kota Jambi (Jambi Paket C).

Kemudian, di Kota Makassar dilakukan empat pekerjaan yakni pembangunan IPAL atau Makassar Waste Water Treatment Plant/WWTP B1, pembangunan sistem pengumpulan air limbah dan perpipaan (Makassar Sewer System B2), dan perpipaan air limbah kota Makassar Zona Barat Laut (Paket C1 dan C2).

Lalu, di Kota Pekanbaru akan dibangun IPAL atau Pekanbaru Waste Water Treatment Plant/WWTP B1, Sewerage and Transfer System (Pekanbaru North Sewerage NC), dan perpipaan air limbah Kota Pekanbaru-Area Selatan (Paket SC-1 dan SC-2).

Tindak lanjut terakhir, per November 2019, di Kota Jambi tengah dilakukan perbaikan dokumen lelang dan dokumen RPB (Rencana Pelaksanaan Biaya) untuk pekerjaan Jambi WWTP B1 dan Jambi Sewer System B2, yang menunggu persetujuan Dirjen Cipta

Karya. Sementara itu, pekerjaan Jambi paket C hanya dokumen RPB yang tengah menunggu persetujuan Dirjen Cipta Karya.

Kemudian, di Makassar, dokumen lelang pembangunan IPAL juga tengah diperbaiki, tetapi untuk pekerjaan penandatanganan kontrak pekerjaan Makassar Sewer System B2, yang tekan kontrak dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. pada 14 November 2019 dengan nilai Rp180,7 miliar, sampai pada proses penarikan uang muka dan mobilisasi.

Adapun Paket C1 dan C2 yang dilelang ulang tengah dilakukan evaluasi teknis dan diperkirakan penandatanganan kontrak akan dilakukan pada awal Desember 2019.

Terakhir, sejumlah pekerjaan di Pekanbaru tengah berproses. Progres pekerjaan konstruksi Paket SC-1 sudah mencapai 26,62% dan Paket SC-2 mencapai 30,50%. Pembahasan dokumen RPB untuk pekerjaan Pekanbaru WWTP B1 tengah dilakukan dan menunggu persetujuan Dirjen Cipta Karya. Sedangkan pekerjaan Pekanbaru North Sewerage NC, berdasarkan hasil lelang dengan usulan pemenang dari BP2JK yakni PT Adhi Karya, akan dilakukan evaluasi ulang.

## DOKUMEN LELANG

Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga menyampaikan bahwa progres pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di Jakarta, tengah memasuki proses dokumen lelang. "Yang di Jakarta, sekarang lagi dokumen lelang. Semoga bulan ini bisa masuk proses lelang," ujarnya kepada *Bisnis*.

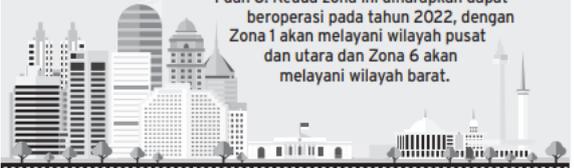
Dalam catatan *Bisnis*, detail engineering design (DED) untuk zona 1 sudah rampung. DED akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan lelang pekerjaan fisik, mulai dari IPAL hingga jaringan pipa. Diharapkan

## Profil Jakarta Sewerage System (JSS)

Nilai Investasi	: Rp69,6 Triliun
Skema Pendanaan	: APBN, KPBU dan B2B
Lokasi	: DKI Jakarta
Penanggung Jawab Proyek	: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Mulai Konstruksi	: 2019
Rencana Mulai Operasi	: 2022
Status Proyek	: Tahap Penyiapan

Proyek Jakarta Sewerage System akan menangani pengolahan limbah domestik di 15 zona (termasuk Zona yang sudah beroperasi), dengan rencana pembangunan awal pada Zona 1 dan 6. Kedua zona ini diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2022, dengan Zona 1 akan melayani wilayah pusat dan utara dan Zona 6 akan melayani wilayah barat.

Sumber: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas



- |   |   |
|---|---|
| Zona 1 merupakan pembangunan sistem pengolahan limbah terpusat yang terdiri dari: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);</li> <li>2) Sistem perpipaan;</li> <li>3) Sambungan rumah, dengan cakupan wilayah seluas 4.901 Ha.</li> </ol> |
|---|---|

Bisnis/Patricia Cahya Pratiwi

pembangunan konstruksi sudah bisa dimulai pada tahun depan.

Diketahui, investasi pembangunan zona 1 mencapai Rp9,87 triliun, terdiri atas Rp7,7 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rp2,1 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta.

Sedangkan pendanaan porsi APBN berasal dari pinjaman Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

Perwakilan Senior Kantor JICA Indonesia Ogawa Ryo mengatakan JICA sudah terlibat dalam proyek SPAL Jakarta sejak tahap penyiapan. JICA membantu Pemerintah RI dalam penyusunan rencana induk yang membagi pelayanan air limbah di Jakarta menjadi 15 zona.

JICA, katanya, mendanai konsultasi proyek tersebut lewat fasilitas pinjaman *official development assistance* (ODA) senilai 1,96 miliar yen atau setara Rp253,11 miliar. JICA juga siap mengucurkan pinjaman 57,06 miliar yen atau Rp7,33 triliun untuk konstruksi proyek SPAL Jakarta Zona 1.

Ogawa menuturkan, JICA berharap penyelesaian proyek SPAL Jakarta bisa meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat perkotaan. Sebagaimana diketahui, SPAL Jakarta zona 1 bisa melayani hampir satu juta jiwa yang tersebar di delapan kecamatan.

Instalasi pengolahan air limbah pada zona 1 akan dibangun di Pluit seluas 3,9 hektare dengan kapasitas 240.000 meter kubik air limbah per hari. ■